

PERAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM PENERBITAN AKTA PERKAWINAN DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PROVINSI LAMPUNG

Indra Kusuma Sanjaya
NPP. 29.0544

*Asdaf Provinsi Lampung
Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

Email: indrasanjaya0544@gmail.com

ABSTRACT

The author focuses on the problem that there are still many non-Muslim married couples who do not yet have a marriage certificate because they do not understand the importance of a marriage certificate and are constrained by access to distance and area. **Objective:** The purpose of this research is to find out and analyze how the role of the Department of Population and Civil Registration in the issuance of Marriage Certificates in East Lampung Regency, the obstacles faced and the efforts to overcome these obstacles. **Methods:** This study uses a descriptive qualitative method with an inductive approach and analysis of the role according to Soejono Soekanto which consists of 3 dimensions, namely Position, Power, and Authority. Data collection techniques using in-depth interviews (12 informants), documentation and observation and using data analysis techniques using data analysis techniques according to Creswell. **Results/Findings:** That the role of the Population and Civil Registration Office of Lampung Regency in Issuing Marriage Deeds in East Lampung Regency is not optimal because of the low ownership of Marriage Certificates in East Lampung Regency. **Conclusion:** The role of the Population and Civil Registration Office of Lampung Regency in Issuing Marriage Certificates in East Lampung Regency has been carried out properly in accordance with standard operating procedures and applicable laws, but it has not run optimally, especially in increasing the issuance of Marriage Certificates so it is necessary to continue to do innovations which continues to be developed in an effort to increase the ownership of the Marriage Certificate in East Lampung Regency

Keywords: Marriage Certificates, Publication, Role

ABSTRAK

Penulis berfokus pada permasalahan masih banyaknya pasangan suami isteri non-Islam masih banyak yang belum memiliki Akta Perkawinan karena kurang memahami akan pentingnya Akta Perkawinan dan terkendala oleh akses jarak dan luas wilayah. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penerbitan Akta Perkawinan di Kabupaten Lampung Timur, kendala yang dihadapi serta upaya-upaya dalam mengatasi kendala tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan analisis terhadap Peran menurut Soejono Soekanto yang terdiri dari 3 dimensi yaitu Kedudukan, Kekuasaan, dan Wewenang. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara mendalam (12 informan), dokumentasi dan observasi serta menggunakan teknik analisis data menggunakan teknik analisis data menurut Creswell. **Hasil/Temuan:** Bahwa Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dalam Penerbitan Akta Perkawinan di Kabupaten Lampung Timur belum optimal karena masih rendahnya kepemilikan Akta Perkawinan di Kabupaten Lampung Timur. **Kesimpulan:** Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung dalam Penerbitan Akta Perkawinan di Kabupaten Lampung Timur sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan standar operasional prosedur dan Undang-Undang yang berlaku namun saja belum berjalan optimal khususnya dalam meningkatkan penerbitan Akta Perkawinan sehingga perlu untuk terus dilakukannya inovasi-inovasi yang terus dikembangkan dalam upaya meningkatkan kepemilikan Akta Perkawinan di Kabupaten Lampung Timur

Kata Kunci: Akta Perkawinan, Penerbitan, Peran



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang berarti seorang manusia pasti akan berinteraksi dengan manusia lainnya, timbulnya rasa ingin berinteraksi tersebut karena seorang manusia memiliki kebutuhan hidup yang ingin terpenuhi dan dalam mendapatkan kebutuhan itu, manusia wajib bersosialisasi dengan manusia lainnya. Salah satu contoh hubungan antar manusia satu dengan manusia lainnya adalah perkawinan.

Perkawinan sendiri merupakan jalinan lahir batin antara laki-laki dan perempuan bertujuan guna membangun rumah tangga yang bahagia, harmonis dan abadi secara sah menurut agama dan kepercayaan masing-masing dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tercatat oleh lembaga bukti peristiwa nikahnya. Akta perkawinan merupakan dokumen penting yang mencatat bukti peristiwa pernikahan. Dalam melakukan pencatatan, untuk yang beragama Islam maka pencatatan akan dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama dengan langsung ditertibkan melalui buku nikah dan untuk yang beragama non-Islam maka pencatatan itu dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melengkapi persyaratan yang sudah ditetapkan.

Dalam hidup bernegara dan bermasyarakat, Pasangan suami istri pada dasarnya wajib memiliki dokumen berupa Akta Perkawinan karena pembuatan Akta Perkawinan ini bukan hanya formalitas saja tetapi mempunyai maksud dan tujuan yaitu sebagai bukti yang kuat dan sah tentang status perkawinan, memberikan kepastian kepada seorang istri untuk mendapatkan haknya secara penuh guna memberikan kesejahteraan kepada anak-anaknya, menjamin hak waris, dan juga akan memudahkan dalam mengurus hak asuh anak jika suatu saat akan bercerai serta membantu pemerintah dalam upaya menertibkan dokumen kependudukan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa “Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan” Kemudian dicatat kedalam register dan akan diterbitkan menjadi Kutipan Akta Perkawinan oleh pejabat yang berwenang.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Permasalahan yang berkaitan dengan Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Penerbitan Akta Perkawinan di Kabupaten Lampung Timur yaitu masih banyak penduduk pasangan suami isteri non-Islam yang belum memiliki Akta Perkawinan kemudian selanjutnya masih banyak masyarakat khususnya pasangan suami isteri non-Islam yang belum mengetahui bagaimana mekanisme pembuatan Akta Perkawinan serta apa kegunaannya. Faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi adalah dikarenakan kurang jelasnya penyampaian terkait mekanisme pembuatan Akta Perkawinan, jarak dan luas wilayah, kurang jelasnya pengoptimalan koordinasi yang dilakukan dengan beberapa OPD dan Kepala Desa se-Kabupaten Lampung Timur serta kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat yang rendah.

Setelah dilakukannya beberapa upaya untuk mengatasi hambatan terkait Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Penerbitan Akta Perkawinan seperti meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan inovasi-inovasi pelayanan dan meningkatkan sarana prasarana yang dimiliki oleh dinas terkait untuk mempermudah pelayanan. Dengan itu diharapkan masyarakat menjadi sadar akan pentingnya tertib administrasi kependudukan khususnya Akta Perkawinan dimana hal tersebut akan membantu masyarakat dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan kependudukan. Namun meskipun telah dilakukannya inovasi-inovasi, sosialisasi, peningkatan sarana dan prasana serta upaya lainnya masih saja rendah kepemilikan Akta Perkawinan ini karena upaya yang dilakukan belum berjalan dengan maksimal.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian sebelumnya, yaitu terkait dengan pelayanan kependudukan. Penelitian Rinaldo Oktaviano dengan judul *Peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi Dalam Penerbitan Kartu Identitas Anak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak* dimana dalam penelitian ini ditemukan pelaksanaan program KIA yang dijalankan sudah cukup baik berjalan sesuai dengan Permendagri nomor 2 Tahun 2016 namun untuk Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sendiri masih belum optimal dapat dibuktikan dari jumlah kepemilikan KIA hanya sebesar 23.94%

Penelitian berikutnya yaitu penelitian dari Muhammad Fadil yang berjudul *Peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Mengoptimalkan Pelayanan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat* dimana bahwa telah ditemukan pelaksanaan optimalisasi Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (GISA) yang dilaksanakan belum berjalan baik karena banyak masyarakat Kota Bandung yang belum memahami terkait prosedur permohonan penggunaan dokumen kependudukan.

Penelitian berikutnya yaitu penelitian dari Sitti Mariya dengan judul *Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pemenuhan Hak Warga Negara Terhadap Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kabupaten Aceh Barat* dimana bahwa telah ditemukan Pemenuhan Hak Warga Negara dalam pembuatan KTP-el di Kabuapten Aceh Barat belum berjalan maskimal, karena masih banyak penduduk yang belum memiliki KTP-el.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana pnelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baru serta informan yang lebih luas. Penulis melakukan penelitian terhadap peran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Penerbitan Akta Perkawinan. Berbeda dari Rinaldo Oktaviano, Fadil Muhammad dan Sitti Mariya. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat mengetahui serta memahami Peran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Penerbitan Akta Perkawinan terhadap para pasangan suami isteri non-Islam yang belum mengurus dokumen Akta Perkawinannya.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Penerbitan Akta Perkawinan di Kabupaten Lampung Timur, faktor penghambat, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Penerbitan Akta Perkawinan di Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deksriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dikarenakan pendekatan kualitatif mampu mendeskripsikan fenomena sosial yang diharapkan dapat menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan Peran Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dalam Penerbitan Akta Perkawinan.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 12 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Sekretaris Dinas, Kepala Seksi Pendataan Penduduk, Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian, Kepala Seksi Inovasi Pelayanan, Tokoh Masyarakat dan beberapa Masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis peran Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dalam Penertiban Akta Perkawinan di Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung menggunakan teori peran dari Soejono Soekanto yang terdiri dari 3 dimensi yaitu Kedudukan, Kekuasaan, dan Wewenang. Adapun pembahasannya dapat dilihat dalam sub bab berikut:

3.1. Kedudukan

Menurut Soejono Soekanto (2015) salah satu unsur dari peranan merupakan aspek dinamis, yang mana aspek dinamis tersebut menjadi bagian dari suatu kedudukan (status). Kedudukan yang dimaksud adalah dasar dari status Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dalam melaksanakan tupoksi, hak dan kewajiban serta perannya. Kedudukan adalah posisi yang dianggap penting didalam suatu kelompok sosial, adapun kedudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur sendiri adalah sebagai instansi yang memiliki posisi penting didalam masyarakat karena memiliki tupoksi dan hak dalam melaksanakan pendataan, pencatatan kependudukan dan peristiwa penting penduduk.

Kedudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dalam penerbitan Akta Perkawinan di Kabupaten Lampung Timur sangat penting dan berguna untuk masyarakat karena masyarakat dapat mendaftarkan, mencatatkan pernikahannya dan nantinya akan diterbitkan melalui Akta Perkawinan. Selanjutnya penulis juga melakukan observasi selaras dengan hasil penelitan yang sudah penulis lakukan bahwasannya masih banyak masyarakat khususnya pasangan suami isteri non-Islam di Kabupaten Lampung Timur yang belum mempunyai Akta Perkawinan. Hal tersebut terjadi dikarenakan masyarakat pasangan suami isteri non-Islam belum mengetahui dan memahami terkait pentingnya Akta Perkawinan, ini dikarenakan tupoksi, hak dan

kewajiban, serta peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur belum berjalan optimal walaupun sudah berjalan dengan baik dikarenakan terkendala dengan beberapa faktor seperti faktor jarak atau luas wilayah, sarana dan prasarana, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat yang akhirnya membuat mereka kurang pemahaman dan akhirnya enggan untuk membuat Akta Perkawinan yang merupakan keperluan administrasi pernikahan mereka.

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi menunjukkan bahwasannya Kedudukan (status) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur sudah berjalan dengan baik namun belum berjalan dengan optimal hal ini berdasarkan data kepemilikan Akta Perkawinan yang hanya sebesar 25% pada tahun 2021 atau hanya naik 4% dari tahun 2020% yaitu sebesar 21% dan masih cukup jauh dari capaian target penerbitan Akta Perkawinan yaitu sebesar 80%.

3.2. Kekuasaan

Kekuasaan menurut Soekanto merupakan kemampuan atau pengaruh yang dimiliki seseorang atau kelompok dalam mempengaruhi individu atau kelompok lain, dan kekuasaan juga bisa menentukan arah kebijakan dan keputusan apa yang akan diambil dalam sebuah kelompok sosial, tentunya dalam menentukan arah kebijakan dan mengambil suatu keputusan tersebut perlu adanya legalitas yang jelas dan dapat di pertanggungjawabkan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur memiliki Kekuasaan (power) yang mempunyai legalitas yang jelas dan sah secara hukum oleh karena itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur diberikan kekuasaan untuk mempengaruhi masyarakat agar masyarakat bisa tertib administrasi kependudukan khususnya dokumen Akta Perkawinan, tentunya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur terkait dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang sudah ditetapkan pada masing masing bidang dan sub bidang dalam suatu organisasi.

Dalam menjalankan suatu kekuasaan (power), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur memiliki dasar hukum yang merupakan pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi dan perannya yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Lampung Timur. Dasar hukum sendiri merupakan ketentuan perundang-undangan yang dijadikan acuan dalam penerapan suatu tindakan atau kebijakan oleh seseorang atau badan dengan maksud supaya mengetahui batasan, posisi dan sanksinya

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan pada dimensi Kekuasaan (power) bahwasannya Kekuasaan (power) yang dimiliki dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dalam menjalankan Peranan penerbitan Akta Perkawinan di Kabupaten Lampung Timur sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku karena dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawab serta perannya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur berpedoman dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang menjadi dasar hukum dalam menjalankan semua tugas, fungsi dan tanggung jawabnya

tersebut, dan juga sosialisasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik akan tetapi belum berjalan dengan optimal karena hanya dilakukan 2 kali dalam setahun.

3.3. Wewenang

Wewenang atau kewenangan menurut Soejono Soekanto dapat dibedakan menurut sumbernya, kepentingannya, teritoria, ruang lingkungannya, dan menurut urusan Pemerintah. Kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditujukan guna kepentingannya yaitu kepentingan untuk mendata dan mencatatkan data kependudukan dan peristiwa penting kependudukan. Tentunya dalam menjalankan suatu kewenangan harus melakukan koordinasi, pendelegasian serta inovasi agar kewenangan yang ada bisa berjalan dengan baik dan optimal.

Kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dalam penerbitan Akta Perkawinan di Kabupaten Lampung Timur sangat penting karena dengan adanya kewenangan yang dimilikinya bisa menghimbau dan mengajak masyarakat untuk mendaftarkan, mencatatkan data kependudukan dan peristiwa penting kependudukannya dalam hal ini Akta Perkawinan dalam maksud agar masyarakat tertib administrasi kependudukan.

Kewenangan yang dimiliki dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dalam menjalankan Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penerbitan Akta Perkawinan di Kabupaten Lampung Timur sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dan ditetapkan baik dari segi inovasi yang dilakukan contohnya seperti layanan mobil keliling dalam layanan jemput bola, serta masih dalam tahap proses pembuatan aplikasi silantim berjaya yang mana nantinya pembuatan dan penerbitan Akta Perkawinan dapat dilakukan secara online. Kemudian juga koordinasi, dan delegasi yang dilakukan sudah dilaksanakan dengan baik hanya saja belum bisa berjalan optimal yang mana apabila inovasi-inovasi, koordinasi dan delegasi ini dilakukan dan dijalankan dengan seoptimal mungkin pastinya akan berpengaruh kepada peningkatan kepemilikan Akta Perkawinan secara signifikan.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan dari Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Penerbitan Akta Perkawinan di Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi dan kewajiban dari Dinas untuk dapat memfasilitasi masyarakat agar bisa tertib administrasi kependudukan terkhusus dalam pembuatan Akta Perkawinan sehingga mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan lainnya akan tetapi Peran tersebut belum berjalan secara optimal karena baru sebesar 25% saja pasangan suami isteri non-Islam yang sudah mempunyai Akta Perkawinan, yang mana capaian target penerbitannya yaitu sebesar 80% .

Peran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung telah berjalan dengan baik namun belum optimal sama halnya seperti temuan Rinaldo Oktaviano, 2019. Namun beberapa kendala juga masih ditemui dalam pelaksanaan dari Peranan yang dilakukan yaitu masih banyaknya masyarakat yang acuh tak acuh serta kurang paham mengenai kebijakan dan mekanisme penerbitan Akta Perkawinan ini.

Selain itu, penelitian ini pun berbeda dari temuan Fadil Muhammad, 2019 dimana penelitian sebelumnya lebih menganalisis pelaksanaan optimalisasi Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (GISA) yang dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Kota Bandung. Selanjutnya peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung lebih meneliti kepada tertib administrasi kependudukan mengenai kepemilikan Akta Perkawinan pada pasangan suami isteri non-Islam, tidak seperti temuan Sitti Mariya, 2019. Dimana berfokus pada peran Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil dalam pemenuhan pelayanan pembuatan KTP-el.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan hambatan dalam Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penertiban Akta Perkawinan di Kabupaten Lampung Timur karena Jarak dan luas wilayah, sarana dan prasarana yang masih belum memadai, kurang jelasnya penyampaian terkait mekanisme pembuatan Akta Perkawinan, kemudian kurang jelas dan optimalnya koordinasi yang dilakukan dengan beberapa OPD dan Kepala Desa se-Kabupaten Lampung Timur dimana dampaknya berpengaruh pada rendahnya kepemilikan Akta Perkawinan karena masyarakat yang kurang pemahaman dan kesadaran terhadap kepemilikan Akta Perkawinan karena menganggap Akta Perkawinan tersebut tidak begitu penting sehingga menyebabkan masyarakat enggan membuat dan mengurusnya.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Penertiban Akta Perkawinan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung masih mengalami beberapa hambatan dan belum cukup optimal dikarenakan data kepemilikan Akta Perkawinan yang meningkat setiap tahunnya namun tidak signifikan atau belum optimal yaitu hanya naik 4% dari tahun 2020 yang sebesar 21% meningkat menjadi 25% pada tahun 2021. Kemudian juga untuk Kedudukan (status), Kekuasaan (Power), dan Wewenang (Authority) yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dalam penerbitan Akta Perkawinan di Kabupaten Lampung Timur belum berjalan optimal hal ini dibuktikan dari masih rendahnya kepemilikan Akta Perkawinan di Kabupaten Lampung Timur yang hanya sebesar 25% pada tahun 2021.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan teori menurut Soejono Soekanto

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Penertiban Akta Perkawinan untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Creswell, J. (2013). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Penj. Achmad Fawaid. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- (2016). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dwiyanto, A. (2005). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gulo, W. (2000). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Grasindo Anggota IKAPI.
- Hardiansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Soekanto, S. (2015). *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Kardian, A. (2016). *Komunikasi Sosial Pembangunan, Tinjauan Komunikasi Dalam Pembangunan Sosial*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.
- Kotler, P. (2008). *Manajemen Pemasaran Edisi 12 Jilid 2*. Jakarta: Indeks.
- Lupiyadi, R. (2015). *Praktikum Metode Riset Bisnis, Edisi Pertama*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suhartini, Y. (2011). Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa dalam berwiraswasta. *Jurnal Akmenika UPY*, 7(1), 24. [http://ekonomi.upy.ac.id/files/ANALISIS%20FAKTOR-FAKTOR%20YANG%20MEMPENGARUHI%20MINAT%20MAHASISWA%20%20DALAM%20BERWIRASWASTA%20\(YATI%20SUHARTINI\).pdf](http://ekonomi.upy.ac.id/files/ANALISIS%20FAKTOR-FAKTOR%20YANG%20MEMPENGARUHI%20MINAT%20MAHASISWA%20%20DALAM%20BERWIRASWASTA%20(YATI%20SUHARTINI).pdf). Diakses pada tanggal 1 September 2021.
- Fadhil, M., & Ilham, M. (2019). Peranan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Mengoptimalkan Pelayanan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (Gisa) Di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Registratie*, 1–20. <http://ejournal.ipdn.ac.id/jurnalregistratie/article/view/827>. Diakses pada tanggal 2 September 2021.
- Mariya, S., & Rinaldi, Y. (2019). Peranan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Dalam Pemenuhan Hak Warga Negara Terhadap Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Di Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 3(1), 167–177. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/kenegaraan/article/view/14902>. Diakses pada tanggal 2 September 2021.